

DETERMINASI EKONOMI KAPITALISME DALAM MENCIPTAKAN KETIDAKAMANAN EKONOMI NEGARA BERKEMBANG

Yusuf Fadillah Tirta Kusumah

Program Studi Ilmu Politik FISIP UNPAD

E-mail: kusumahyusuf05@gmail.com

Arfin Sudirman

Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNPAD

E-mail: arfin.sudirman@unpad.ac.id

Deasy Silvyia Sari

Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNPAD

E-mail: deasy.silvyia@unpad.ac.id

ABSTRAK

Globalisasi merupakan salah satu peristiwa yang baru dan inheren bersama dengan konsep liberalisasi pasar dan keterbukaan setiap negara. Demikian pula keterkaitan ini tidak lepas dari cara pandang dan logika dari kapitalisme yang haus akan ekspansi akan tanah bernilai rendah. Hal ini terjadi terhadap negara berkembang sebagai entitas global yang berkecimpung dalam integrasi pasar global dengan mengharapkan kompetisi yang setara terhadap negara lain demi terciptanya keamanan ekonomi serta terjaminnya perdamaian. Tujuan dari pembuatan paper ini yaitu memberikan pemahaman sekaligus menjelaskan mekanisme modernisasi serta dampaknya terhadap negara negara berkembang. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pengambilan sumber data berupa studi pustaka seperti menggunakan buku, jurnal, dan laporan sebagai dasar argumentasi sehingga data yang dikeluarkan kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara berkembang yang masuk dalam integrasi ekonomi global malah menciptakan ketidakamanan ekonomi karena faktor eksternal, berupa tekanan dari rejim internasional dan negara maju untuk terus mengekspor hasil ekstraksi bahan primer dan menciptakan barang sekunder di negara berkembang. Kesimpulan yang didapat ialah adanya integrasi ekonomi global, negara berkembang tidak bisa meningkatkan dan menciptakan poros dan pondasi ekonomi dalam negeri karena sudah ketergantungan dengan hasil ekstraksi dan ekspor komoditi untuk dibawa ke negara maju.

Kata Kunci : Globalisasi, Kapitalisme, Ketidakamanan, Negara Berkembang.

ABSTRACT

Globalization is one of the new and inherent events along with the concept of market liberalization and the openness of each country. Likewise, this connection cannot be separated from the perspective and logic of capitalism which is thirsty for the expansion of low-value land. This has happened to developing countries as global entities engaged in global market integration by expecting equal competition against other countries in order to create economic security and ensure peace. The purpose of making this paper is to provide an understanding as well as explain the mechanism of modernization and its impact on developing countries. The research method used in this study is a qualitative research method by taking data sources in the form of literature studies such as using books, journals and reports as the basis for arguments so that the data released is credible and can be accounted for. The results of this study indicate that developing countries that are included in global economic integration actually create economic insecurity due to external factors, in the form of pressure from the international regime and developed countries to continue to export the results of primary material extraction and create secondary goods in developing countries. The conclusion obtained is that there is global economic integration, developing countries cannot increase and create the axis and foundation of the domestic economy because they are already dependent on the extraction and export of commodities to be brought to developed countries.

Keywords: *Capitalism, Developing Country, Globalisation, Insecurity.*

PENDAHULUAN

Modernisasi merupakan suatu perkembangan dari rasio manusia dalam meningkatkan pengetahuan serta melepaskan jeratan dari nilai feodalisme yang mapan. Adam Smith menjelaskan bahwa modernisasi dibangun atas landasan kapitalisme dengan menitikberatkan pada spesialisasi dan akumulasi kapital individu dan pada akhirnya menapai titik dimana susunan individu-individu sudah mapan secara ekonomi berdasarkan kebebasan inisiatif sebagai kedaulatan tertinggi dalam kehidupannya (Smith, 2008).

Teoritikus selanjutnya adalah Max Weber, baginya masyarakat tradisional tertentu mempunyai ciri seperti norma, hidup dalam dunia tertutup, kekerabatan, takut akan perubahan dan pasrah pada nasib sehingga nilai-nilai modernisasi akan sulit masuk dalam kehidupan kulturalnya namun sebagian memiliki sifat-sifat modernisasi seperti berorientasi masa depan, pola terbuka dan gaya hidup kreatif dan inovatif (Oatley, 2008). Maka, Perjuangan terhadap kapitalisme memerlukan penguasaan dan okupasi lahan untuk akumulasi modal (Albritton & Simoulidis, 2003).

Setelah Adam Smith berpikir tentang caranya mencapai kemakmuran dalam bukunya *The wealth of Nation*, para teoritikus abad ke-19 sampai ke-20 mendefinisikan modernisasi sebagai pertumbuhan dan proses dari pembangunan serta kemakmuran secara ekonomi dengan terbuka luasnya akses terhadap pasar dan hari ini sejatinya memang melihat modernisasi sebagai inovasi, menciptakan teknologi, dan pengendalian sumber daya alam dalam mengatur dan meningkatkan ekonomi (Gilpin, 1987). Namun dengan dijalankannya sistem perekonomian yang bersifat kapitalistik, tidak semua negara mampu dalam bersaing secara adil, entah karena masalah internal negara maupun karenanya adanya faktor lain yang mempengaruhi keamanan negara dalam sektor politik, sosial dan ekonomi. Argumen tersebut dijalankan oleh sejumlah negara dalam memakmurkan negara mereka demi

terciptanya kemakmuran dan keamanan bagi masyarakatnya secara ekonomi. Shaw berpendapat bahwa globalisasi atau modernisasi ini adalah seperangkat yang kompleks dari tiap proses yang berbeda namun bersinggungan seperti ekonomi, sosial, budaya dan militer menuju skala global dan jangkauan global (Ahmed, 2004). Oleh karenanya memang modernisasi ini hanya bisa dijalankan oleh aktor yang hidup lama dengannya. Hal ini juga disepakati oleh Ellwood dimana menyebutkan secara spesifik bahwa globalisasi merupakan integrasi ekonomi global yang diluncurkan untuk kepentingan beberapa aktor tertentu lewat jaringan perusahaan multinasional (Ahmed, 2004).

Namun, setelah terjadinya perang dunia kedua, perekonomian negara-negara berkembang jatuh kedalam jurang ekonomi. Negara berkembang memang merupakan negara yang notabene baru mengalami kemerdekaan yang cukup singkat dibanding negara-negara yang mapan seperti Eropa dan Amerika Utara, tapi perlu dilihat bahwa kekayaan alam di negara berkembang merupakan salah satu *absolute advantage*-nya dalam memenuhi kepentingan nasional dan keamanan nasional (Arfard, 1999).

Merujuk kepada dokumen *Canadian Security Intelligence Service*, keamanan sektor ekonomi yaitu terpeliharanya stabilitas untuk mendorong kelanjutan produktivitas baik tenaga kerja sampai dengan modal sehingga bisa terciptanya keamanan dan kesejahteraan suatu negara. (Chotimah et al., 2019) Jika semua sumber daya negara berkembang diambil oleh kekuatan struktural, maka keamanan ekonomi di negara selatan akan menjadi terancam. Ancaman ekonomi tak hanya fokus dalam wacana global, namun juga menjadi permasalahan akut di tingkat individu. Sehingga permasalahan keamanan ekonomi ini mencakup 2 analisis, negara dan entitas sosial (Morgan, 2002).

Indonesia sendiri juga termasuk negara berkembang yang didominasi oleh kekayaan alam yang melimpah juga masuk dalam jaringan kerangka neoliberalisme yang

merujuk pada pasar bebas. Namun dengan proses ekspor baik itu kekayaan alam dan banyaknya *absolute advantage* yang dimilikinya, Indonesia tidak keluar dalam kelas negara berkembang. Alih-alih proses dalam menuju pembangunan yang mapan, sebaliknya ketimpangan malah semakin melebar dan kesetaraan dalam akses ekonomi terganggu.

Berdasarkan pemaparan diatas, paper ini berupaya untuk mendeskripsikan fenomena yang berlangsung di Indonesia baik dalam jeratan kapitalisme dan cara untuk mencapai keamanan ekonominya. Hal ini dapat memberikan semacam pemahaman pada negara berkembang bagaimana seharusnya dalam mencapai keamanan ekonominya diluar *status quo* yang ada. Nampaknya sangat perlu dikaji mengingat ini sangat kontradiktif seperti apa yang ingin dicapai oleh modernisasi dan senyatanya perlu adanya refleksi tentang perdagangan bebas berikut dengan mekanisme dan bagaimana cara ia bekerja. Atas dasar pemikiran dan latar belakang, paper ini memunculkan suatu pertanyaan yakni “mengapa negara berkembang tidak bisa mencapai keamanan ekonomi di dalam suatu modernisasi/globalisasi?”

Tujuan dari pembuatan paper ini yaitu memberikan pemahaman sekaligus menjelaskan mekanisme modernisasi serta dampaknya terhadap negara negara berkembang khususnya Indonesia, berikut dengan menambah memberikan perspektif lain dalam melihat modernisasi khususnya dari kacamata hubungan internasional. Paper ini kiranya cukup untuk mengkritik sistem modernisasi sehingga tidak terjebak pada status quo dalam integrasi ekonomi internasional. Penulis juga menggunakan beberapa *literature review* untuk memperkuat penelitian dan memberikan perspektif berbeda.

Pertama, saya mengambil dari tulisannya Nafeez Mossadeq Ahmed yang berjudul “*The Globalization of Insecurity : How the International Economic Order Undermines Human and National Security on a World Scale*” yang diterbitkan oleh Jurnal *Historia Actual Online* yang terbit pada bulan Oktober.

Nafeez menjelaskan bahwa adanya keterkaitan antara sistem ekonomi pasar bebas dan keamanan baik negara maupun lingkup yang lebih kecil yaitu keamanan manusia atau *human security*. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa sistem itu mempengaruhi negara berkembang dari aspek kebebasan dalam berekonomi maupun kedaulatan sebagai negara merdeka karena adanya jaringan yang kuat. Terlebih cara yang dilakukan dalam mencapai stagnasi ekonomi negara selatan, dia menambahkan aktor negara yang notabene maju yang didukung oleh perusahaan multinasional dalam menggerakkan sistem perekonomian yang timpang dengan terus memberikan barang sekunder dari negara tersebut untuk dikonsumsi sedangkan basis ekonomi dalam negeri dirusak dengan mengharuskan barang primer diekspor ke wilayah utara.

Selanjutnya saya memakai penelitian yang ditulis oleh Eart Conteh-Morgan yang berjudul “*Globalization and Human Security : A Neo Gramscian Perspective*” yang diterbitkan pada tahun 2002. Eart menuliskan bahwa dari abad ke dua puluh ke abad dua puluh satu dicirikan dengan tren yang sangat bersinergi satu sama lain yaitu integrasi politik dan ekonomi global dengan argumen bahwa internasionalisasi membawa keuntungan di segala aspek skala global. Namun Eart membantah argumen itu karena satu sisi membawa dampak buruk untuk belahan dunia lain baik itu berbentur dengan ideologi dan adanya dorongan struktural, menjadikan neoliberalisme tidak di distribusikan secara merata baik itu individu, kelompok, maupun negara sekalipun. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pasar bebas merupakan aspek ‘kontrak sosial’ yang dibawa secara normatif antara negara dan masyarakat, karena adanya gerak dari kapitalisme yang tidak terorganisir dengan baik sehingga menimbulkan ketidakamanan dan ketidakpuasan. Menurut Eart, globalisasi adalah pelebaran ruang lingkup dan intensifikasi kegiatan sosial-ekonomi, politik, dan budaya serta pengaruhnya di seluruh dunia (positif dan negatif) pada individu, kelompok, dan seluruh masyarakat. Kecepatan dan

kedalaman keterkaitan ini dimanifestasikan dalam perluasan dan internasionalisasi pasar keuangan, manajemen perusahaan global, komunitas epistemik dan interpretif di seluruh dunia sehingga berimplikasi pada hubungan kekuasaan yang relatif baru muncul dari perubahan pola investasi global, dan konstruksi sosial baru dari kognisi, identitas dan makna yang dibangun.

Yang terakhir, penulis menggunakan literatur berupa buku yang ditulis oleh Richard Westra yang berjudul *“Confronting Global Neoliberalism : Third World Resistance and Development Studies”* yang diterbitkan pada tahun 2010. Richard menjelaskan bahwa negara negara di negara berkembang dan terkhusus di Indonesia telah mengalami investasi yang besar pada tahun 1970 hingga 1990-an dengan kebijakan yang berpatok pada penggabungan ekspor dan substitusi impor. Sistem ekonomi politik yang dipakai di negara di Asia Tenggara pada akhirnya jatuh ke nilai nilai *Pax Americana* dengan mencetuskan pasar bebas sebagai variabel utamanya. Pada krisis tahun 1998 dan 2008, Richard mengutip laporan dari *International Monetary Fund (IMF)* bahwa sebenarnya kasus yang ada di Asia Tenggara disebabkan oleh utang yang besar karena investasi dengan bunga relative rendah, ekspansi moneter yang cepat ditambah dengan pondasi ekonomi dalam negeri tidak mampu menopang krisis tersebut. Dengan demikian negara berkembang di kawasan Asia Tenggara mengalami stagnasi ekonomi yang menjadikan ketidakamanan terhadap kondisi dalam negeri. Krisis ekonomi pertengahan 1998 dan 2008 merupakan sinyal bahwa kebijakan ekonomi sudah mulai bertransisi secara penuh kepada nilai neoliberalisme dengan menerapkan *Washington Consensus*.

TINJAUAN PUSTAKA

Keamanan Ekonomi dalam dimensi Negara

Dalam buku *People, States & Fear*, Buzan berpendapat bahwa fokus studi keamanan hanya eksklusif pada negara berupa ancaman militer yang menjadi standar. Setelah perang dingin, keamanan yang masih bersifat *hardpower* menghasilkan keterbelakangan

konseptualisasi keamanan. Keamanan ekonomi terletak pada belum terselesaikannya debat antara peran negara dan lepasnya negara dalam ekonomi politik internasional, yang melibatkan sifat hubungan antara struktur politik anarki dan struktur ekonomi pasar. Perbedaan pendapat terjadi antara kelompok merkantil dan liberal dengan mendasarkan negara untuk ikut campur terhadap perekonomian atau negara lepas tangan terhadap pasar. Atas dasar inilah buzan membuat asumsi yang dia kembangkan bahwa setiap ancaman terhadap warga negara bisa jadi karena pertumbuhan dan perkembangan sosial, sehingga keamanan bisa menyasar kearah yang lain. Karena itu dia menguraikan lebih luas kerangka teoritis dengan mengembangkan keamanan dari tiga tingkat analisis: sistem internasional, negara dan individu. Namun dia tetap memusatkan perhatian pada negara sebagai aktor yang berdaulat dan institusi yang menjamin keamanan manusia.(Buzan, 1983) Ia juga memperluas cakupan konsep keamanan itu sendiri, termasuk dimensi politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Menurutnya, konsepsi keamanan ekonomi menyangkut soal akses ke sumber daya perbankan dan akses terhadap pasar untuk meningkatkan kesejahteraan negara dan meningkatkan *power* negara, bahkan untuk menstabilkan sosial politik negara. Kerawanan ekonomi negara berkembang seperti kosekuensi utang dan kerugian struktural ditunjang oleh sistem kapitalisme global yang bisa menimbulkan konflik horizontal, kejahatan, dan kekerasan di berbagai teritorial negara (Buzan et al., 1998).

Fasher berpendapat bahwa negara negara berkembang mengalami ketimpangan dan ketidakamanan ekonomi di tingkat negara karena kelemahan strukturalnya oleh ekonomi kapitalis, akibatnya kerentanan konflik intra negara bahkan antar negara (Gamayanti & Nulhaqim, 2019). Salah satu contoh konkrit bagaimana negara kongo secara internal mengalami konflik bersenjata namun dilihat dari cakupan yang luas, kebingungan negara itu akibat adanya ekspansi asing yang mengakibatkan perebutan sumber daya karena

hanya dengan cara itu negara kongo dapat mengakumulasi kekayaan. Contoh lain adalah Amerika Serikat sangat bergantung pada non bahan bakar seperti mineral, logam untuk membuat pesawat terbang, peralatan baja, mesin jet, giroskop dan alat persenjataan lain sehingga total mencapai 75 persen bergantung ke negara berkembang. Dari contoh tersebut bahwa semua alutsista bisa memadai karena adanya pasokan yang tak terbatas dari negara lain dan keamanan ekonomi bagian dari hal itu (Ahmed, 2004). Sedangkan Klare menyorot peran dari globalisasi alam memperburuk situasi keamanan negara akibat ekonomi dengan ucapannya :

"Kekuatan pasar global hanya dapat meningkatkan kemungkinan konflik, terutama ketika sumber daya yang diperebutkan dipandang sangat berharga dalam istilah moneter sehingga tidak ada penggugat yang terlibat bersedia menerima kerugiannya. Risiko konflik internal atas sumber daya semakin diperburuk oleh kesenjangan yang semakin besar antara si kaya dan si miskin di banyak negara berkembang, sebuah fenomena yang secara luas dianggap berasal dari globalisasi. Mereka semakin terhalang dari akses ke komoditas penting seperti makanan, tanah, tempat tinggal, dan air minum yang aman. Ketika persediaan menyusut dan harga banyak bahan naik, orang miskin akan semakin putus asa dan dengan demikian lebih cenderung untuk mengindahkan desakan para fundamentalis, dan ekstremis yang berjanji untuk meringankan penderitaan mereka melalui pemberontakan atau pemisahan etnis." (Renner, 2002).

Artinya, pasar global secara harfiah hanya dapat memunculkan konflik baru Karena perebutan komoditi oleh kumpulan negara maju, secara internal dapat menjadi ancaman karena adanya konflik senjata serta dipertinggi oleh kesenjangan dengan basis kekayaan, antara kaya dan miskin. Ditambah adanya

globalisasi akses vital seperti komoditas sebagai pangan, lahan, dan komoditi lain serta air minum (Ahmed, 2004).

Struktur Ekonomi dalam Modernisasi

Globalisasi memang sangat panjang dan internasionalisasi perdagangan melalui skema perdagangan dan pembagian kerja internasional untuk melayani kaum dominan memang menjadi sebuah hal yang tak bisa dihindarkan. Menurut Wallerstein sendiri, seorang ekonom marxis terkenal mengungkapkan bahwa dunia perlu diakui sebagai suatu sistem, adanya sistem ini terdiri dari kerangka kerangka lain untuk sistem itu bekerja, maka perlu dilihat bahwa salah satu yang terkorbankan adalah negara dunia ketiga. Secara genealogi negara dunia ketiga mengalami kolonisasi yang secara fundamental karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi di negara maju, baik secara aturan kolonialnya dengan menerapkan spesialisasi agrarian sampai pada tahap distorsi sosial yang berdampak kumulatif pada kondisi negara dunia ketiga (Morgan, 2002).

Namun proses ini tidak lagi seperti yang dilakukan pasca kolonial, skema kapitalistik yang dijalankan lebih terstruktur berdasarkan jaringan yang sudah terbentuk. Ekspor yang dilakukan negara terbelakang ke negara industri maju lebih kepada mengeksport komoditas. Namun dengan adanya skema pembangunan tersebut, negara berkembang sudah mengalami ketergantungan sehingga tidak fokus kepada pembangunan yang memperkuat dalam negeri. Kedua, bentuk industrialisasi dihadirkan di beberapa wilayah untuk mendukung produk-produk utama dari industri maju, melemahkan industri-industri asli dan memperlebar ketergantungan pada pusat produksi di negara maju. Program-program modernisasi maupun globalisasi ekonomi yang didukung oleh pihak industri maju dirancang untuk memperkuat distorsi struktural ini (Goldstein, 2005). Ini menandakan bahwa rezim perdagangan global melayani kepentingan industri maju dengan mengekstraksi kekayaan alam di negara selatan, sementara negara selatan memproduksi barang

bernilai tinggi sementara negara selatan dipaksa untuk meningkatkan taraf konsumsi dan dikerahkan untuk memasok tenaga kerja murah dan bahan mentah dengan pembagian tenaga kerja atau *division of labour* yang tidak setara (Tilly & Goodin, 2006).

Sebenarnya menurut Geogre Nef skema ekonomi global tidak berbeda dengan skema kolonialisme, adanya kesamaan yang signifikan terletak pada sistem akumulasi yang terpusat, konsentris, dan dilembagakan untuk menjaga stabilitas komoditas dan keuangan. Lebih jelasnya, Nef menjelaskan komponen fundamental yang terkonsentrasi adalah soal perdagangan, keuangan, dan perlindungan hak kepemilikan bisnis internasional dimana sudah diatur untuk kepentingan rejim beserta langkah dan klasifikasinya:

1. Konteks historis dan struktural, perang dingin merupakan salah satu peristiwa yang menjadi kemenangan kapitalisme sehingga menjadi bertambahnya marginalisasi dunia ketiga (Nef, 1999).
2. Komponen kedua adalah landasan budaya dan ideologi ekonomi global yakni neoliberalisme yang menghegemon (Karlner, 2000).
3. Adanya rejim internasional yang menjadi regulator seperti WTO, OECD, IMF, EBRD, ASEAN dan NAFTA. Rejim ini berkorelasi dengan struktur domestik seperti kementerian keuangan, dewan perbendaharaan dan bank sentral melalui perjanjian internasional dan persyaratan eksternal yang melekat pada kebijakan fiskal, moneter, dan kredit (Nef, 1999).
4. Mengakomodasikan semua komponen diatas untuk menegosiasikan kebijakan dan pelayanan untuk kepentingan kelas kapitalis dalam perluasan dan pemaksimalan akumulasi kapital (Karlner, 2000).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan mengedepankan argumentasi dan analisis berdasarkan pemikiran.

Sedangkan dalam pengambilan data penulis menggunakan studi pustaka sebagai basis seperti buku, jurnal, berita, majalah ilmiah, laporan, dan surat dari pemerintah. Penulis menggunakan beberapa literatur review dalam meneliti dan memahami problematika sehingga penulis secara jelas dapat menemui titik terang dan kompatibel dalam menyusun tulisan ini. Literatur yang diambil penulis merupakan penulisan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya baik itu jurnal, buku, laporan, thesis maupun disertasi yang terdaftar dalam dunia akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masuknya Indonesia dalam Integrasi Ekonomi Global

Seluruh industri di dunia sekarang telah dan sedang berubah kepada cara kerja jaringan produksi yang sangat besar, sering disebut juga sebagai Jaringan Produksi Global yang dijalankan oleh TNC's dan MNC's (*Transnational Corporations and Multinational Corporations*). Jaringan yang kompleks ini mewakili unit alihdaya, pusat pusat manufaktur, pusat pusat distribusi bagian mesin, pusat logistik, kantor pemasaran, penjual, dan konsumen sub nasional. Apa yang kita miliki sekarang adalah pembagian kerja yang kompleks dan lintas global dalam memfasilitasi arus barang, uang dan informasi yang rumit (Taylor, 2008). Kompleksitas ini juga mendarat di berbagai wilayah khususnya regional Asia Tenggara yang tertuang dalam *Master Plan of ASEAN Connectivity* dalam memperluas wilayah kerja serta pengambilan surplus dalam arti ekstraksi sumber daya. Salah satu bukti bagaimana ekspansi pasar luar negeri merusak tatanan ekonomi dalam negeri, penghapusan tarif sebanyak 99% dari seluruh barang dan jasa yang diperdagangkan di kawasan ASEAN sejak Januari 2010 (*ASEAN-China Free Trade Area: Not a Zero-Sum Game*, 2012).

Di Indonesia, orde baru adalah era yang mencerminkan perubahan rezim populis di negara dunia ketiga, berubah hampir ke semua aspek menjadi militer dan otoriter (Putri Maharani et al., 2022). Mulanya konsep

pembangunan kesetaraan yang merujuk pada Amartya Sen berubah menjadi pembangunan berdasarkan prinsip modernisasi ala kapitalisme. Nilai yang dijalankan oleh rejim ini sesuai dengan resep yang diambil dalam ekonomi liberal yaitu industri substitusi impor (ISI). Melalui kebijakan ISI, Indonesia harus secara progresif mengubah orientasi impor dan produksi dalam negeri dengan memusatkan perhatian pada industrialisasi untuk memenuhi kebutuhan akan produk sekunder (Abdoellah & Mulyanto, 2019). Dengan sokongan kebijakan yang akhirnya bermuara pada dukungan modal berupa investasi asing, PDB Indonesia meningkat sebesar 7,5 sampai 7,9 persen, ditambah dengan laju pertumbuhan industri manufaktur sebesar 9,6 sampai 14,6 persen pada rentang waktu 1980an (Wie, 1996). Arah bagi industrialisasi jaman orde baru ditetapkan oleh GBHN oleh putusan MPR setiap lima tahun dengan tujuan utama pembangunan Indonesia adalah mencapai struktur ekonomi yang seimbang dimana industri manufaktur yang kuat dan maju didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Sektor ini diberi nama Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) meliputi empat tahap dalam mendukung industri manufaktur. Repelita I memprioritaskan pada pembangunan industri manufaktur yang mendorong pertanian. Repelita II memprioritaskan pada industri pengelolaan sumber daya alam yang menghasilkan bahan baku (primer). Repelita III menetapkan bahwa industri yang dapat didirikan adalah yang dapat mengelola bahan baku industri menjadi produk industri manufaktur. Sementara yang terakhir adalah membangun barang industri menjadi barang hasil rekayasa (Barang Modal). Dalam membagi periodisasi di zaman orde baru, maka ada tiga fase utama yang dilalui, yaitu :

1. Fase stabilisasi (1966-1973) liberalisasi di sektor tertentu dan pemulihan ekonomi.
2. Fase Boom Minyak (1974-1982) tumbuhnya ekonomi yang drastis dan adanya campur tangan pemerintah.

3. Pasca Boom Minyak (1983-1996) deregulasi, liberalisasi kembali dan pertumbuhan yang diprioritaskan oleh ekspor.

Dalam pengembangan industri juga ada 3 fase, yaitu pengembangan ISI dengan spesialisasi dan penyempurnaan struktur industri, pengembangan industri lewat penguasaan teknologi di beberapa bagian dan pengembangan berorientasi ekspor (Setiawan, 2014).

Seluruh strategi pembangunan di negara terbelakang dihapus dan diformulasikan oleh nota kesepahaman perdagangan bebas. Indonesia adalah contoh klasik bagaimana entitas negara dipermainkan kedaulatan ekonominya lewat WTO dan IMF sejak tahun 1990an sedangkan cikal bakal nya terjadi pada 40 tahun silam. Ketika masuknya fase reformasi, Indonesia tidak mempunyai strategi dasar pembangunan ekonomi nasional sehingga perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang diserahkan pada pasar bebas. Kemudian terikatnya kepada seluruh rejim perdagangan WTO sejak tahun 1994, *ASEAN Free Trade Area*, *China-ASEAN Free Trade Area 2004*, dan *Jepang-Indonesia* pada 2007 maka perlahan Indonesia membuka jalan lebar bagi invasi ekonomi luar negeri. Cukup memasukan segala regulasi dagang dan pasal ke dalam hukum positif, otomatis kedaulatan atas ekonomi Indonesia rusak (Setiawan, 2013). Rejim devisa dan sistem keuangan yang sangat pro pasar menyebabkan Indonesia semakin berada dalam kerentanan krisis. Liberalisasi oleh IMF awalnya sebagai pembukaan pintu menjadi paradoks dan terjebak dalam perjanjian perdagangan bebas.

Perjanjian di WTO mencakup tiga hal dasar yaitu barang, jasa, dan kepemilikan intelektual. Inti dasarnya adalah liberalisasi, dengan penerapan komitmen anggota anggotanya untuk merendahkan tarif bea masuk dan hambatan perdagangan lainnya, serta untuk tetap membuka pasar sektor jasa. Disamping itu ada yang namanya prosedur untuk penyelesaian sengketa negara dengan diharuskan transparan dalam setiap kebijakan dengan selalu melapor kepada WTO lewat

tinjauan kebijakan perdagangan (*trade policy reviews*), dengan struktur dasar dari perjanjian adalah sebagai berikut :

Table 1. Struktur Dasar Perjanjian WTO

Umbrella	Agreement Establishing WTO		
	Good	Services	Intellectual Property
Basic Principles	GATT	GATS	TRIPS
Additional Details	Other Goods agreement and annexes	Services Annexes	
Market Access commitment	Countries Schedules of commitment	Countries' schedules of commitments (and MFN exemptions)	
Dispute settlement	Disputes Settlement		
transparency	Trade policy reviews		

Sumber: Setiawan, Bonnie. *WTO dan Perdagangan abad 21* (Resist Book: Sleman).

Pola perjanjian tentunya tidak statis, dengan adanya preposisi bahwa kapitalisme rentan terhadap krisis maka perjanjian tersebut terus dirundingkan dan diperbarui dari waktu ke waktu, malah berpotensi untuk ditambahkan dengan perjanjian lain. Putaran Doha sebagai titik dari semua perjanjian mempunyai sifat yang mengikat yang apabila tidak dilaksanakan, negara akan mendapatkan aduan dari pelaku pasar ke *dispute settlement body* sehingga dapat hukuman. Demi meminimalisir kejadian tersebut negara anggota WTO selalu mendapat kunjungan untuk tinjauan ulang atau *trade policy reviews*

atas komitmen yang dijalankan. Indonesia sendiri masuk kedalam lingkaran tersebut karena adanya paksaan dari pasar dan cenderung tidak memperkuat industri dalam negeri (Hoekman et al., 2002) Dalam kaitannya dengan perjanjian ini, Indonesia juga melakukan beberapa kebijakan yang disesuaikan dengan nilai WTO yang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi, antara lain:

Table 2. Aturan WTO Terhadap Aktivitas Dagang

Barang (goods)	Jasa (Services) / GATS	TRIPS (Trade Related Intellectual Property Right)
Pertanian	Mobilitas Manusia	Hak cipta (Copy Right)
Aturan Kesehatan Produk Tani	Transport Udara (Air Transport)	Merk (Trade Mark)
Tekstil dan Pakaian	Jasa Keuangan (Financial Services)	Indikasi Geografis (Geographic Indications)
Technical Barriers to Trade	Perkapalan (Shipping)	Desain Industrial (Industrial Design)
Anti Dumping	Telekomunikasi (Telecommunications)	Paten (Patents)
Bea Customs Valuation		Desain Layout (Topographies)
Aturan asal usul barang		Sirkuit Padu (Integrated Circuit)
Inspeksi pra		Keterbukaan (Undisclosed)

pengapala n		<i>ed Informatio n)</i>
Lisensi Impor		Rahasia Dagang (<i>Trade Secrets</i>)
Subsidi		
Perlindung an		
<i>Trade Related Invesment Measured (TRIMS)</i>		

Sumber : www.wto.org

Keunikan dari WTO terletak pada meluasnya sektor sektor yang akan diatur dan dengan demikian kekuasaannya yang semakin besar, meskipun sebenarnya hal yang diatur oleh WTO saat ini sudah banyak. Disamping itu karena sifatnya *legal binding* atau mengikat sehingga perjanjian yang dihasilkan mengikat terhadap seluruh negara anggota secara ketat, disiplin, dan tentu saja sanksi. Di dalam WTO, negara industri maju mempunyai kekuasaan yang besar karena selalu mengaitkan komitmen WTO dengan program IMF dan Bank Dunia terkait bilateral atau utang, yang membuat negara berkembang tidak bisa bergerak ke arah alternatif sehingga makin lama perekonomian mereka terselimuti hutang (Baldwin, 2011).

Stagnasi Rejim Ekonomi Global dan Krisis Indonesia

Krisis moneter yang terjadi di Amerika Serikat senyatanya tidak berdampak pada ekonomi dalam negerinya saja, melainkan juga meluas skala global. Kawasan Eropa yang menerapkan regionalism sebagai pertahanan utama ekonominya, maupun Asia Timur dengan kebangkitan ekonomi yang mulai melesat tetap terkena dampak krisis. Fenomena empirik ini pada umumnya berdampak pada turunnya nilai tukar, inflasi yang sangat tinggi, runtuhnya ekonomi makro yang ditandai oleh bangkrutnya perusahaan,

indeks bursa yang hancur karena ketidakpastian ekonomi. Stagnasi ini satu sisi mengurangi pasokan likuiditas sektor keuangan dikarenakan bangkrutnya lembaga keuangan internasional terkhusus bank khusus investasi yang berpengaruh pada aliran kas perusahaan (Utami, 2018).

Sedangkan untuk Indonesia sendiri secara langsung ialah kerugian perusahaan yang menanamkan modalnya di Institusi keuangan Amerika Serikat seperti bursa saham, lalu pengaruh yang secara tidak langsung terkait dengan perekonomian Indonesia ditandai dengan naiknya suku bunga, menurunnya likuiditas, nilai komoditas rontok, mata uang rupiah turun, dan pertumbuhan sumber dana yang stagnan cenderung turun. Dalam menyelesaikan krisis, Bank Sentral Indonesia membuat strategi yaitu memperkuat likuiditas sektor perbankan, kebijakan terkait neraca pembayaran dan menjaga pertumbuhan kredit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Regulasi ini berfungsi agar tetap memperkuat sektor perbankan untuk mengurangi bahkan mengantisipasi dampak pengeringan likuiditas global, serta upaya mendukung pertumbuhan ekonomi sektor kredit pada level yang tetap, di lain hal Indonesia mencari dana untuk meminimalisir defisit anggaran pendapatan dari sumber yang bukan berdasarkan mekanisme pasar, seperti bilateral maupun multilateral. Selain itu Sinergitas dijalin oleh Bank Sentral Indonesia dan pemerintah untuk menjaga jaring pengaman sektor keuangan (JPSK) atau *financial safety net*, sehingga mekanisme yang dibuat berjalan lancar dalam menghadapi krisis. Maka dari itu pemerintah mengupayakan percepatan pembahasan UU JPSK dan mengeluarkan Perppu tentang amandemen kedua UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia serta Perppu tentang revisi Atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang LPS (M. Zidny Nafi' Hasbi, 2019).

Semua ini berawal dari kebijakan rekayasa AS yang dikenal sebagai *subprime mortgage* berupa surat kredit rumah atau KPR yang memiliki bunga yang sangat rendah sehingga kebutuhan akan rumah meningkat (*boom in the housing market*), ditambah dengan adanya

kelesuan pasar saham dan investasi teknologi. Pada rentang waktu 2001 sampai 2005 kebutuhan yang meningkat akan rumah tadi membuat masyarakat konsumtif namun tidak digerakan oleh uang mereka sendiri, melainkan dengan meminjam kepada bank yang menjadi cikal bakal utang bank. Suku bunga yang rendah juga mendorong perusahaan untuk berekspansi keluar negara serta tendensi menjamurnya instrumen kapital yang risikonya tinggi (*higher risk higher return*) (Teguh Sihono, 2008). Kerugian yang dialami bank khusus investasi dunia mencapai US \$160 miliar, dan terus naik bahkan berpotensi akan mencapai US \$300 miliar. (M. Zidny Nafi' Hasbi, 2019) Lebih parahnya para ahli moneter memprediksi total kerugian bisa mencapai USD 1 triliun. Pada tanggal 12 dan 13 April 2008 dalam hasil pertemuan IMF dan IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*) yang dihadiri pejabat keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang berjumlah 185 dari setiap negara, ditambah pertemuan G-7 pada April 2008 di Washington DC, memastikan angka kerugian akibat krisis *subprime mortgage* AS mendekati USD 1 triliun (Teguh Sihono, 2008).

Berdasarkan genealoginya, terlihatnya krisis ini menyatakan bahwa kapitalisme tidak mampu lagi mengatasi perbedaan pandangan dari kepentingan yang begitu beragam, yang malah dikanalisis ke dalam satu pandangan, yaitu perdagangan bebas ala neoliberalisme. (Harvey, 2010) Selain efek dominonya krisis, sistem ekonomi yang terintegrasi dan bebas dengan patokan negara maju sebagai faktor determinan yang tersentralisasi menjadikan pergeseran ke arah krisis yang semakin inklusif bisa terjadi jika kondisi ekonomi di negara mereka sedang sulit. WTO yang menerapkan sistem ekonomi neoliberalisme secara mendasar bertentangan dengan paham pembangunan nasional, walaupun tetap bersifat kapitalistik. Masalahnya adalah kepentingan pasar bisa diraih oleh negara maju, sementara negara negara berkembang dan terbelakang tidak bisa selamat atas dilandanya krisis karena sistem ekonomi yang tidak berdasarkan mekanisme

pasar dan hanya berupa komoditi baik sudah di ekstraksi atau belum (Setiawan, 2013).

Ketidakamanan Indonesia dalam Integrasi Ekonomi Global

Adanya gejolak dalam perkembangannya dan kontradiksi antara kepentingan pasar bebas dan kepentingan negara dalam hal ini pembangunan perlu adanya refleksi khususnya bagi negara berkembang. Persoalan yang lebih besar terletak pada negara berkembang dalam mengkonsepsikan pembangunan serta adanya perbedaan antara mulainya proses pembangunan. Menurut Wallerstein sendiri, pembangunan yang didasarkan pada prinsip neoliberalisme dan segala macam turunannya merupakan proses pengambil atau penghisapan negara berkembang dalam hal hasil alam yang di ekstraksi maupun mentah. Lebih jauh lagi, ada sekelompok negeri maju atau inti yang bersaing demi akses ke sumber daya dunia, dominasi ekonomi, dan hegemoni atas negara berkembang dengan melakukan tiga cara yakni dominasi produktivitas yang memungkinkan mereka memproduksi barang lebih tinggi kualitasnya dengan harga lebih murah dibandingkan dengan produk sama namun di negara lain, mengekstraksi nilai lebih lebih besar dari produk dunia, dan dominasi finansial ketika bankir dari negara dominan cenderung mendapatkan kendali atas sumber daya finansial dunia (Abdoellah & Mulyanto, 2019).

Siklus industri saat ini merujuk pada pemimpin pasar yang sama dengan menerapkan monopoli-semu, melalui penguasaan atas industri dan produk utama pasar yang memerlukan campur tangan teknologi, paten, pembatasan atas impor atau ekspor, subsidi pemerintah dan lain lain. Utilitas ini yang menjadikan negara maju dapat mengakumulasi kapitalnya melalui industri dan monopoli-semu, ditambah dengan adanya negara pertengahan antara maju dan berkembang dengan terus menjaga ekonominya tidak persis sama seperti negara berkembang, ia cenderung mengeksport lebih ke negara berkembang dan impor dari negara inti. Ketika kapital sudah terakumulasi maka

efek dominonya ialah lapangan kerja banyak dan penghasilan meningkat sesuai dengan logika kapital yang terus mencari tanah rendah nilai, maka ia harus ekspansi keluar dibarengi karena overkomulasi yang menjadi penyakit akut dari kapitalisme yang menyebabkan persaingan harga pula (Harvey, 2009). Dalam menekan biaya produksi, proses produksi dalam industri produk sekunder dialihkan ke negara semi pinggiran dalam bentuk finansial seperti komprador menurut pemikiran Dos Santos, sedangkan dalam bentuk investasi langsung ke negara berkembang untuk memulai produksi barang.

Sejumlah studi mengatakan bahwa ketidakamanan ekonomi akibat dari krisis kapitalisme berujung pada konflik antar negara, Paul Collier dan Ankie Hoffler misalnya mengatakan bahwa kurangnya peluang ke sektor ekonomi akan berdampak besar bagi keluhan politik selaras dengan kebutuhan ekonomi karena adanya kewajiban negara yang tidak bisa ditetapi sesuai dengan fungsi negara. Teori ini persis sama dengan apa yang dikatakan oleh James Fearon dan David Latin yang mengemukakan bahwa korelasi antara konflik dan persoalan ekonomi, dengan redistribusi kekayaan yang tidak merata karena adanya pemusatan kekayaan secara kumulatif mengurangi keterlibatan negara dalam aspek ekonomi. Semua formasi ini diakibatkan oleh sistem ekonomi yang terintegrasi dengan sedemikian rupa yang kita sebut sebagai neoliberalisme. Dibawah kebijakan ini seperti stabilisasi ekonomi makro, deregulasi dan privatiasi sumber daya mempunyai efek domino yakni utang luar negeri yang besar sedangkan lembaga keuangan internasional hanya menanggapi dengan menganjurkan pemotongan pengeluaran pemerintah dan kebijakan fiskal (Ahmed, 2004). Ketimpangan ekonomi dan politik yang dilembagakan ini merupakan bagian penguatan ketergantungan dengan pembatasan perkembangan pasar yang buruk dan membatasi kapasitas budaya. Keterbatasan yang dikenakan pada pasar negara-negara miskin secara khusus tercermin dalam pengalihan sumber daya mereka ke negara-

negara maju dan dominan. Konsekuensinya adalah ketidaksetaraan yang semakin dalam, inefisiensi yang dilembagakan, dan terkadang kekerasan di negara-negara berkembang (Morgan, 2002).

Indonesia yang telah lama ikut dalam poros WTO nyatanya tidak siap dalam penguasaan forum perundingan Rejim tersebut, bahkan dalam mempersiapkan strategi besar dalam perundingan yang sedang *on going* atrau belum. Premis ini diakui sendiri oleh DELRI (Delegeasi RI) dan Depperindag (Kemendag), kenyataan ini terutama disebabkan tidak adanya perumusan agenda nasional selama orde baru, karena selalu ada intervensi politik berdasarkan kepentingan individu apa yang disebut sebagai kapitalisme semu atau komprador. Keterbukaan pasar dan terintegrasinya Indonesia dalam perekonomian global tidak membawa kesejahteraan sebagaimana dihendaki oleh pasar. Malah sakit yang akut juga dibawa ke Indonesia dengan menghatarkan krisis moneter tahun 1997 datang karena liberalisasi keuangan yang terbuka tanpa kendali, sejalan dengan regulasi GATS (*General Agreement on Trade in Service*) yang sifatnya mengikat. Sehingga Indonesia tidak bisa lagi melindungi dirinya bila ada goncangan keuangan global. Padahal fluktuasi keuangan global berlangsung terus menerus, hal yang tidak seberapa bagi perekonomian AS dan Jepang karena sudah mapan. Dampak umum selain ketergantungan akut ialah kebijakan. Kini Indonesia sudah punya lagi ruang kebijakan dan pilihan opsional (*Policy space and Policy Options*) kebijakan hanya satu, yakni liberalisasi ekonomi ke arah pasar bebas sebagaimana yang dicetuskan oleh Rejim Internasional, misalnya pertanian atau pangan dengan menerapkan bea masuk yang hampir 0% untuk komoditi dari luar. Perubahan regulasi ini berbahaya karena sifatnya yang permanen dan sulit untuk diubah. Seperti metaphor perangkap, dimana orang akan masuk ke sebuah ruangan lewat pintu, dan pintu itu ditutup selamanya dan orang itu tidak akan kembali kecuali menerapkan kebijakan neoliberalisme. Maka, bahwa kebanyakan

upaya negara berkembang yang niatnya adalah kesejahteraan malah membawa kontradiksi karena adanya kebijakan sejalan dengan liberalisasi didorong oleh WTO guna memuaskan investor asing dan korporasi. Semakin jauh negara berkembang menerapkan kebijakan yang sama dengan pasar, semakin jauh negara berkembang akan sejahtera dan berdaulat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas, ekonomi negara berkembang terkhusus Indonesia sulit untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan karena adanya faktor eksternal dalam mempengaruhi kebijakan suatu negara. Adanya tekanan dari rejim perdagangan global yang terus menekan negara berkembang dalam mengikuti seluruh aturan padahal adanya perbedaan yang signifikan terhadap posisi negara dan kondisi yang berbeda. Ditambah dirusaknya kondisi ekonomi dalam negeri dalam menopang seluruh faktor produksi dalam mencapai kedaulatan atas ekonomi sehingga negara tidak perlu menerapkan Industrialisasi Substitusi Impor (ISI). Saat ini, negara berkembang hanya mengutamakan hasil ekstraksi bahkan komoditi yang hanya siap di ekspor karena adanya kebijakan pasar bebas yang tidak memperbolehkan negara dalam memproteksi ekonomi dalam negeri. Bukan hanya itu, tindakan ini diperparah oleh adanya komprador yang terus mendukung kebijakan yang berbau liberalisasi pasar karena dia diuntungkan baik sifatnya material atau legitimasi atas hasil kerjanya. Indonesia sendiri masuk kedalam jeratan integrasi ekonomi global dimulai ketika masa soeharto dalam hal ini regulasi yang sangat pro terhadap liberalisasi pasar dan dia sendiri juga merupakan komprador. Satu sisi Indonesia belum menopang ekonomi dalam negeri, ditambah harus mengikuti jejak pasar yang hanya mampu bergerak diatas kemapanan, membuat Indonesia hanya bisa menjadi dan berkompetisi dengan negara berkembang lainnya dalam hal ekstraksi hasil komoditi bahkan komoditi nya saja. Ini yang menjadikan

korporasi global mengambil langkah dengan menerapkan *race to the bottom* dengan mengekspansi daerah rendah nilai dalam mengambil surplus atas hasil ekstraksi bahan primernya. Dengan demikian, negara berkembang tidak akan pernah bisa untuk mencapai keamanan ekonominya baik secara jangka waktu dekat dan panjang, perlu adanya penguatan ekonomi dalam negeri terlebih dahulu.

Kesimpulan ini sekaligus menjawab pertanyaan penelitian bahwasanya negara berkembang tidak akan pernah mencapai tingkat yang aman maupun sejahtera karena adanya faktor eksternal, baik secara consensus maupun koersif lewat state apparatus negara itu sendiri.

Saran

Negara Berkembang seharusnya menganut prinsip pasar mandiri terlebih dahulu karena sebelum suatu entitas baik negara maupun kawasan harus memperkuat ekonomi dalam negeri maupun dalam kawasan agar kedaulatan ekonomi bisa terwujud dengan sehingga perusahaan multinasional maupun aktor pasar bebas yang masuk kedalam suatu negara tersebut bisa bersaing secara sempurna.

Indonesia sebagai negara yang besar dan kekayaan yang sangat melimpah seharusnya mampu dengan penguasaan sumber daya dengan mekanisme ekonomi terpimpin atau ekonomi merkantilisme agar pondasi ekonomi seperti komoditas dan manufaktur bisa terwujud dan bisa bersaing dengan pasar bebas ketika sumber daya dikuasai dan perusahaan dalam negeri dapat bersaing secara modal dan kapabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, O. S., & Mulyanto, D. (2019). *Isu Pembangunan: Pengantar Teoritis* (First Edit). Gramedia Pustaka Utama.
- Ahmed, N. M. (2004). The globalization of insecurity. How the international economic order undermines human and national security on a World scale. *Historia Actual Online*, 5(5), 113–126.
- Albritton, R., & Simoulidis, J. (2003). New

- Dialectics and Political Economy. *New Dialectics and Political Economy*. <https://doi.org/10.1057/9780230500914>
- Arfard, R. N. (1999). Kecenderungan Politik Internasional Kontemporer. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 3, Issue 1, pp. 1–15).
- ASEAN-China Free Trade Area: *Not a Zero-Sum Game*. (2012).
- Baldwin, R. (2011). *21st Century Regionalism: Filling the gap between 21st century trade and 20th century trade rules* (ERSD-2011-08).
- Buzan, B. (1983). *People, States and Fear : the National Security in International Relations* (First Edit). John Spiers.
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. de. (1998). *Security : A New Framework for Analysis* (B. Buzan, O. Waever, & J. de Wilde (Eds.); First Edit). Lynne Rienner.
- Chotimah, H. C., Sandec, J. P., Dwi C, E., Yusvarini, D. R., & Hong, S. (2019). Perkembangan Aspek Keamanan Ekonomi dalam Konsep Human Security. *Journal Transformasi Global*, 4(1), 65–76.
- Gamayanti, R., & Nulhaqim, S. A. (2019). Konflik Antara Pltu Indramayu li Dengan Warga Mekarsari Dilihat Dari Teori Kebutuhan Manusia Simon Fisher. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20888>
- Gilpin, R. (1987). The Political Economy of International Relations. In *The Political Economy of International Relations* (First Edit). Princeton University Press. <https://doi.org/10.4324/9781315254166-8>
- Goldstein, P. (2005). *Post-Marxist Theory* (J. Natoli (Ed.); First Edit). State University of New York Press.
- Harvey, D. (2009). *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis* (Darmawan (Ed.); First Edit). Resist Book.
- Harvey, D. (2010). *Imperialisme Baru: Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer* (E. P. & D. Yanuardy (Ed.)). Resist Book.
- Hoekman, B., Mattoo, A., & English, P. (2002). Development, Trade, and the WTO. In *Development, Trade, and the WTO* (First Edit). The World Bank.
- Karliner, J. (2000). The corporate planet: ecology and politics in the age of globalization. *Ecological Economics*, 32, 333–336.
- M. Zidny Nafi' Hasbi. (2019). Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan Di Indonesia. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 13(2), 385–400. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.602>
- Morgan, E. C. (2002). Globalization and Human Security: A Neo Gramscian Perpspective. *International Journal of Peace Studies*, 7(2), 58–73. <https://doi.org/10.1080/07488008708408733>
- Nef, J. (1999). *Human security and Mutual Vulnerability: The Global Political Economy of Development and Underdevelopment* (I. D. R. Centre (Ed.); Second Edi). International Developnebt Research Centre.
- Oatley, T. (2008). *International Political Economy* (V. Mukhija (Ed.); Third Edit). Pearson Longman.
- Putri Maharani, S. H., Santoso, P., & Sukendro, A. (2022). Konflik Batas Wilayah Daerah Pemekaran Kepulauan Seribu Mengancam Keamanan Nasional. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 40. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.37915>
- Renner, M. (2002). *The Anatomy of Resource Wars* (T. Prugh (Ed.); First Edit, Issues 1–93). Worldwatch Insitute.
- Setiawan, B. (2013). *WTO dan Perdagangan Abad 21* (First Edit). Resist Book.
- Setiawan, B. (2014). *Jaringan Rantai Kapitalisme Global* (1st Editio). Resist Book.
- Smith, A. (2008). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. *Readings in Economic Sociology*, 6–17.
- Taylor, M. (2008). *Global Economy Contested : Power and Conflict across*

- the International Division of Labour* (M. Taylor (Ed.); First Edit). Routledge.
- Teguh Sihono. (2008). Krisis Finansial Amerika Serikat dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 5(2), 171–192.
- Tilly, C., & Goodin, R. E. (2006). The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis. In R. E. Goodin (Ed.), *The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis*. Oxford University Press.
- Utami, A. T. (2018). Efisiensi Pasar Bentuk Lemah Pada Pasar Modal Indonesia, Malaysia dan Korea Selatan Periode Krisis Ekonomi Global 2008. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 101–116.
<https://doi.org/10.33603/jibm.v2i2.1476>
- Wie, T. K. (1996). *Industrialisasi di Indonesia : Beberapa Kajian* (Second Edi). Pustaka LP3ES.